



Sertifikat

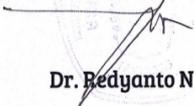
Diberikan kepada

Wawan Darmawan

Atas partisipasi dalam Seminar Nasional
Merawat Memori Kolektif, Memperkuat Integrasi Bangsa
sebagai
Pemakalah

Diselenggarakan oleh Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro
Bekerja sama dengan Perkumpulan Prodi Sejarah se-Indonesia (PPSI) dan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI)
Semarang, 18 November 2018

Dekan FIB UNDIP


Dr. Bedyanto Noor, M.Hum.


Ketua PPSI
Dr. Dhanang Respati Puguh, M.Hum.

PERJUANGAN PANGERAN DIPONEGORO: Beberapa Catatan tentang Pengembangan Karakter Budaya Bangsa¹

Oleh:

Wawan Darmawan (wawand@upi.edu) dan Murdiah Winarti
(murdiyahwinarti@upi.edu)

Pendahuluan

Dalam perkembangan penulisan sejarah atau historiografi tidak dikenal istilah tuntas atau sejarah telah selesai. Penulisan sejarah setiap waktu mengalami perkembangan sesuai dengan ditemukannya fakta terbaru atau sumber-sumber terbaru dengan interpretasi baru juga. Atau bisa juga perkembangan itu muncul sesuai dengan perkembangan keilmuan atau filsafat. Merujuk buku Titik Balik Historiografi di Indonesia (Marihardono, 2008) dijelaskan bahwa sudah banyak kritik atau gagasan yang ditujukan kepada penulisan sejarah (historiografi) karya sejarawan Indonesia, yang dianggap sebagai disorientasi, berwawasan sempit, kurang membuka keragaman tema kajian, terbatasnya penggunaan sumber dsb. Untuk itu perlu ada pelurusan dalam penulisan sejarah (Zuhdi dalam Marihandono, 2008:1). Apalagi dengan masuknya aliran posmo dengan dekonstruksinya dapat menggoyahkan eksistensi ilmu sejarah. Tetapi menurut Sugiharto (1996:16-17) dikatakan tidak semua aliran posmo dekonstruktif, ada kubu konstruktif yang melakukan pembongkaran, namun mereka berupaya mempertahankan dan bahkan mengolahnya dalam upaya mengkontruksi sebuah gambaran dunia yang baru juga.

Terlepas dari dekonstruktif atau konstruktif, aliran posmodernism dalam konteks historiografi yang mempersoalkan fakta, objektivitas, dan kebenaran justru menjadi pokok kajian sejarah. Demikian kuatnya perkembangan keilmuan, tampaknya sejarawan Indonesia semakin dituntut untuk dapat memberikan penjelasan. Untuk itu diperlukan metodologi yang dapat menegaskan tegaknya fakta, objektivitas, dan kebenaran sejarah.

¹ Makalah diseminarkan dalam Seminar Nasional “Merawat Memori Kolektif, Memperkuat Integrasi Bangsa” yang diselenggarakan oleh Departemen Sejarah FIB Universitas Diponegoro, Semarang 18 November 2018

Berkaitan dengan persoalan historiografi tersebut, pelurusan penulisan sejarah, mengenai perjuangan Pangeran Diponegoro (salah satunya) perlu dilakukan dengan menyuguhkan fakta-fakta terbaru sebagai evidensi sejarah yang diharapkan dapat menggambarkan perjuangan Pangeran Diponegoro yang sebenarnya. Apalagi jika dikaitkan dengan pengembangan karakter bangsa yang sedangkan digalakan pemerintah menjadikan setiap peristiwa sejarah sarat nilai yang dapat diambil suri teladan.

Sebelumnya kalau kita simak, sering kali dalam historiografi dihasilkan cerita sejarah yang berbeda. Meskipun sumber yang digunakan sama, interpretasi atas fakta bisa berbeda. Di sini penulisan sejarah Diponegoro bisa jadi kontroversi, satu sisi digambarkan baik sisi lainnya buruk. Dalam perkembangan metode penulisan sejarah, penting untuk mendekonstruksi yang menuntut perubahan penafsiran kembali sumber sejarah. Marihandono (2008:102) mengatakan tujuan utama dari metode dekonstruksi adalah pemberian makna baru atas interpretasi terhadap fakta sejarah. Dekonstruksi lebih menempatkan data, yaitu pada konteks masa pembuatannya untuk mengarahkan pengambilan fakta melalui interpretasi. Dengan demikian, data yang ditemukan sejarawan tidak hanya cukup dibuat interpretasinya saja, tetapi juga harus diketahui bagaimana latar belakang pembuatannya dan penulisnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan informasi yang terkandung dalam data tersebut.

Metode dekonstruksi ini diterapkan untuk meneliti kembali data-data yang ada tentang Pangeran Diponegoro dan perjuangannya. Data arsip perlu ditelusuri untuk diluruskan melalui kegiatan *heuristik* sumber oleh para sejarawan ke berbagai tempat, termasuk di Leiden Belanda. Pada kesempatan ini, perlu disampaikan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai sejarawan mengenai sosok Diponegoro, termasuk salah satunya sejarawan asal Inggris, Peter Carey.

Pandangan lama tentang Pangeran Diponegoro

Bila dirunut, penulisan sejarah di Indonesia masih merupakan sisa kolonial. Dengan demikian isinya terasa “Neerlandosentris” yang mengkerdilkan peran bangsa Indonesia dalam sejarah, melainkan bangsa penjajah sendiri yang paling berperan. Tujuan penulisan sangat jelas untuk memperkuat kekuasaan mereka di

Indonesia. Jadi disusun untuk membenarkan penguasaan bangsa mereka terhadap bangsa pribumi (Indonesia). Sehingga untuk kepentingan tersebut mereka melupakan pertimbangan ilmiah. Historiografi kolonial hanya mengungkapkan mengenai orang-orang Belanda dan peristiwa di negeri Belanda serta mengagung-agungkan peran orang Belanda sedangkan orang-orang Indonesia hanya dijadikan sebagai objek. Historiografi kolonial memandang peristiwa menggunakan sudut pandang kolonial yang ditujukan untuk melemahkan semangat para pejuang atau rakyat Indonesia. Lihat Tokoh sejarah yang dalam pandangan orang Indonesia dianggap sebagai pahlawan, dalam buku ini dipandang sebaliknya yakni sebagai pemberontak dan memiliki sikap-sikap yang sangat negatif, seperti halnya tokoh Pangeran Diponegoro.

Tentang sifat Diponegoro berlainan pendapat penulis-penulis Belanda. Meskipun begitu kebanyakannya menjebut jang buruk sadja, seperti ia sombong, tjuma mengingat kepentingan dirinja sendiri sadja, kasar dan sebagainya. Hanja seorang sadja jang memudji dia dengan njata, jang mengatakan, bahwa ia tjakap sekali, berani, tabah hati (Sanusi Pane, 1965:42).

Segala tindakan Belanda dianggap sebagai suatu yang sah dan benar, bukan suatu pelanggaran. Seperti pada peristiwa penangkapan Diponegoro pada saat perundingan.

Penangkapan Diponegoro, jang terang-terang melanggar perdjandjian itu, dibela oleh de Kock dalam rentjananya kepada G.G. dengan menerangkan, bahwa Diponegoro kenjataan tidak ichlas, sebab ia memadjukan sarat, jang diketahuinja tidak akan dapat dikabulkan pemerintah Belanda. Diponegoro membesarkan lasjkarnja di Magelang. Hal itu melanggar perdjandjian dan membuktikan hati jang tidak ichlas pula. Dalam rentjananya itu de Kock mengemukakan pula, bahwa pemerintah Belanda hendak menghabisi perang karena hendak melindungi radja-radja dan rakjat Djawa (Sanusi Pane, 1965:73)

Dari contoh uraian tersebut di atas nampak, bahwa tindakan de Kock menjebak Pangeran Diponegoro merupakan tindakan yang benar. Pembeneran tindakan de Kock tersebut disebabkan oleh tindakan Diponegoro. Pangeran Diponegoro ditempatkan sebagai tokoh yang melakukan kesalahan.

Pandangan terhadap Diponegoro yang ditulis oleh sejarawan Indonesia itu terlihat jelas sangat dipengaruhi oleh sumber yang ditulis sejarawan Belanda

(Stapel). Upaya Indonesia sentris belum terwujud, justru sebaliknya masih diwarnai oleh *neerlandosentris*. Dan ternyata pengaruh Belanda itu masih kental pada jaman sekarang ini. Untuk itu perlu disandingkan fakta-fakta berdasarkan sumber yang dapat dipercaya. Berikut ini nilai-nilai perjuangan Pangeran Diponegoro dengan mengutip dari berbagai sumber, terutama Peter Carey yang meneliti Perjuangan Diponegoro selama 30 tahun.

Kondisi Jawa menjelang Perang Diponegoro

Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830), merupakan titik kulminasi dari akumulasi kekecewaan yang telah sejak lama dirasakan rakyat Jawa. Kondisi tersebut semakin jelas ketika dikatakan bahwa penyebab utama perang lebih cenderung ke masalah kesulitan ekonomi daripada ambisi kekuasaan seorang kerabat keraton (Carey, 2011: xxxv). Kondisi sosial ekonomi rakyat Jawa, tentu saja tidak terlepas dari kebijakan pemerintah kolonial, antara lain sejak bubarnya *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), Dirk van Hogendorp (1799-1808), Herman Willem Daendels (1808-1811), Thomas Stamford Raffles (1811-1816), dan van der Capellen (1816-1826).

Seorang pejabat Belanda pada akhir VOC, Dirk van Hogendorp menyatakan bahwa, sistem feodal Jawa telah dimanfaatkan VOC dan telah mematikan semangat usaha rakyat. Oleh karena itu, kedudukan bupati dan penguasa daerah harus diatur kembali. Dengan demikian, pemilikan dan penguasaan tanah harus dikembalikan kepada rakyat. Mereka bebas menanam dan melakukan pekerjaan. Akan tetapi, akan ditarik pajak hasil bumi dan uang kepala (Kartodirdjo, 1988: 290).

Ketika Herman Willem Daendels, 1808, ditunjuk oleh Louis Napoleon sebagai Gubernur Jenderal di Jawa, sejak saat itu dimulai adanya perubahan-perubahan administrasi yang dilakukannya. Hal yang sangat mendasar bagi para penguasa Jawa yang feodal, alih-alih untuk melindungi para bupati dari pemerasan dan penghinaan pejabat Eropa, maka para bupati diangkat menjadi pejabat pemerintah Belanda (Vlekke, 2008: 277). Walaupun mungkin ada benarnya, akan tetapi selama masa VOC terlalu banyak bangsawan yang tidak bekerja, hidup mereka bergantung kepada kasil perasan keringat rakyat. Hal ini

menjadi masalah besar bagi para bupati karena dapat mengurangi kekuasaan dan pendapatannya.

Sementara itu, pelaksanaan ide-ide Daendels yang dijiwai ideologi liberal untuk meningkatkan hasil pertanian ternyata tidak berhasil. Kegagalan itu disebabkan oleh sistem feodal yang sulit dihapus. Akibatnya, susah untuk mengubah kedudukan bupati yang berakar kuat dalam masyarakat. Hal lain yang menjadi penyebab kegagalan Daendels adalah sikapnya yang inkonsisten. *Verplichte leveranties* (penyerahan wajib) dan *verplichte diensten* (wajib kerja) masih dipertahankan sehubungan dengan pembuatan *Grote Postweg* (Kartodirdjo, 1988: 292).

Lain dengan penguasa sebelumnya, Raffles memiliki rencana, bahwa para petani harus diberi kebebasan untuk menanam sendiri tanaman dagangan (*cash crops*) yang dapat diekspor ke luar negeri. Secara lengkap, dia membuat tiga asas, yaitu (1) segala jenis dan bentuk penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi harus dihapuskan, dan rakyat Jawa diberi kebebasan untuk menanam tanpa unsure paksaan; (2) peran bupati sebagai pemungut pajak dihapus, dan sebagai gantinya, mereka dijadikan bagian dari pegawai pemerintah kolonial; serta (3) pemerintah kolonial dianggap sebagai pemilik tanah, sehingga rakyat yang menggunakan tanahnya wajib membayar sewa (*landrent*) kepada pemerintah (Poesponegoro dan Notosusanto, 1984: 90).

Kebijakan lain yang juga berdampak kepada rakyat adalah keputusan dari van der Capellen. Dia menyimpulkan bahwa telah terjadi penyelewengan-penyelewengan di seputar penyewaan tanah di Jawa. Oleh karena itu, sewa menyewa agar dihapuskan. Akibatnya, para bangsawan harus mengembalikan uang muka dang anti rugi kepada para penyewa Cina dan Eropa (Ricklefs, 2009: 253). Kondisi yang demikian tentu saja akan berdampak kepada rakyat karena ketika tanah-tanah yang disewakan dikembalikan kepada para bangsawan, maka tanah tersebut akan “disia-siakan”. Dalam artian mereka tidak terbiasa mengolah tanah, sehingga rakyat sendiri, tentu saja tidak cuma-cuma, yang akan menjadi penggarapnya.

Ketentuan-ketentuan di atas, ternyata susah untuk dilaksanakan karena Raffles sendiri terlalu menganggap sederhana masalah. Pada masa itu rakyat India dianggap sama dengan rakyat Jawa (Vlekke, 2008: 299). Secara realita,

terdapat perbedaan yang mencolok antara India dan Jawa, yakni perkembangan ekonomi India lebih maju daripada Jawa. Oleh karena itu, kesalahan interpretasi Raffles menyebabkan kegagalan implementasi program-programnya. Akibatnya, rakyat Jawa sebagai objek penjajahan semakin menderita.

Tatanan masyarakat yang masih bersifat komunal dengan solidaritas yang didasarkan secara emosional pada masyarakat Jawa seringkali disalahgunakan oleh pemerintah kolonial. Kondisi yang demikian itu memperlihatkan homogenitas sosial yang melahirkan sistem tukar menukar tenaga dan jasa berdasarkan prinsip timbal balik antara lain tolong menolong, *punjungan*, dan gotong royong (Kartodirdjo, 1988: 294). Sistem gotong royong itu digalakan penjajah untuk memenuhi berbagai kewajiban yang harus dipenuhi rakyat.

Uraian di atas menggambarkan bahwa beban yang harus ditanggung rakyat, yaitu dalam bidang kerja wajib dan pajak. Kartodirdjo (1988: 381) menengarai berbagai pajak yang dibebankan kepada rakyat, sebagai berikut.

- 1) *Kerig aji (heerendiensten)*;
- 2) *Wilah welit* (pajak tanah);
- 3) *Pengawang-awang* (pajak halaman pekarangan);
- 4) *Pencumpling* (pajak jumlah pintu);
- 5) *Pajigar* (pajak ternak);
- 6) *Penyongket* (pajak pindah nama);
- 7) *Bekti* (pajak menyewa tanah atau menerima jabatan);

Selain yang disebutkan di atas, ada juga *tol* (pajak atau pungutan di tempat pabeyan) yang dikuasai penyewa Cina. Dia memungut pajak semua lalu lintas pengangkutan barang, bahkan seorang ibu yang menggendong anaknya juga dikenakan pajak (Kartodirdjo, 1988: 381). Dengan demikian, semua aktivitas rakyat tidak ada yang terlewat dikenai pajak.

Nilai-nilai Perjuangan Pangeran Diponegoro

Pahlawan nasional yang menjadi teladan mewakili modal simbolis (*symbolic capital*)", demikianlah dikatakan Gerry van Klinken dalam Nordholt dkk (2008). Keteladanan para pahlawan menjadi inspirasi yang memegang peran yang sangat strategis dalam rangka Pendidikan Karakter Budaya Bangsa yang kini sedang dikembangkan. Demikian pula halnya dengan Pangeran Diponegoro,

di samping sebagai manusia biasa yang tentu saja memiliki kelemahan, terdapat banyak keteladanan dari perjuangannya. Pangeran Diponegoro merupakan simbol kepahlawanan nasional meskipun berjuang dalam perspektif lokal namun pengaruhnya meluas sampai ke nusantara bahkan sampai dunia. Sebagaimana Knoerle yang dikutip Carey (2011:125) dalam catatan hariannya secara pribadi mengatakan Gubernur Jenderal harus mempertimbangkan dampak politik akibat pengasingan Pangeran Diponegoro dan ancaman perang di Eropa mengenai kemerdekaan Belgia. Menarik untuk dikaji, bagaimana peran dan nilai yang ada dalam perjuangan Diponegoro dikaitkan dengan pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Berikut ini nilai-nilai yang dapat diambil dalam perjuangan Diponegoro, antara lain:

1. Penegak Syariat Islam

“Sebagai seorang yang berjiwa Islam, ia sangat rajin dan taqwa sekali hingga mendekati keterlaluan” (*Louw* sebagaimana dikutip Carey, 2011)

Pernyataan tersebut tidak salah karena kalau dirunut jejak kehidupan Pangeran Diponegoro dapat diketahui bahwa semasa kecil Diponegoro (Pangeran Ontowiryo) telah diasuh oleh neneknya Ratu Ageng di Tegalrejo di lingkungan pesantren. Disebutkan pengiriman ke Tegalrejo ini dalam rangka menghindari suasana keraton yang penuh dengan intrik dan kemerosotan moral akibat pengaruh Belanda. Menurut ibunya, kondisi ini tidak kondusif bagi pendidikan dan perkembangan anak. Di Tegalrejo Diponegoro belajar pada Kyai Taftayani yang mampu memberikan pengajaran Islam dalam bahasa Jawa. Kitab fiqih *Sirat AlMustaqim* karya Nuruddin Ar Raniri berhasil diterjemahkan Kyai Taftayani ke dalam bahasa Jawa. Dalam *Babad Diponegoro* versi Surakarta, terdapat keterangan bahwa Taftayani ini telah menghubungi Diponegoro pada malam hari sebelum Perang Jawa. Taftayani datang sebagai pemuka agama dan bagi pengurus mesjid serta ahli hukum Islam, dan memberi nasihat kepada Diponegoro untuk menyatakan diri dan memulai perang sabil (Carey, 2011:105). Begitu juga Steenbrink (1984:29) dalam bukunya yang berjudul *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke 19* disebutkan Diponegoro telah belajar Islam dengan serius. Steenbrink

lebih jauh membahas antara lain peranan kaum santri dalam Perang Jawa dan unsur agama dalam Perang Jawa. Kesimpulannya Steenbrink mengatakan pikiran tasawuf, syariat, tarikat, hakikat, dan marifat telah mempengaruhi jalannya perjuangan Perang Diponegoro. Lihat juga Babad Diponegoro, jilid 1 hal 39-40 sebagaimana dikutip oleh Carey (2011) mengatakan bahwa Diponegoro tidak mau dijadikan pangeran mahkota yang akan diangkat menjadi raja. Hal itu dikarenakan Diponegoro ingin bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Besar. Jika menyimak dari isi babad ini jelas Diponegoro seorang sosok yang religius, menjauhi kehidupan duniawi yang rawan akan dosa.

Namun demikian, Diponegoro seorang yang pluraris. Hal itu dapat dilihat Diponegoro yang datang ke Yogya untuk menghadiri acara-acara Gerebeg yang tiga kali setahun untuk merayakan hari lahir Nabi (Maulud), akhir bulan puasa (Lebaran), dan Idul Adha yang juga merayakan Hari Raya Haji (Groneman, 1895:40 sebagaimana dikutip Carey, 2011:192). Khusus acara Gegereg, Diponegoro hadir untuk menunjukkan rasa hormat pada kakeknya, Sultan kedua dan ayahnya dimana dalam acara tersebut semua keluarga sultan wajib hadir. Dari peristiwa ini jelas, Pangeran Diponegoro memiliki sifat pluralisme agama yang tidak pan islamisme seperti halnya tokoh yang lain. Selanjutnya ada alasan yang cukup kuat yang mendasari perjuangan Diponegoro dalam melawan Belanda, yaitu *Jihad fi sabilillah*. Hal ini diakui oleh Louw seperti dikutip Heru Basuki "*Tujuan utama dari pemberontakan tetap tak berubah, pembebasan negeri Yogyakarta dari kekuasaan Barat dan pembersihan agama daripada noda-noda yang disebabkan oleh pengaruh orang-orang Barat*".

Peter Carey dalam ceramahnya yang berjudul *Kaum Santri dan Perang Jawa* tahun 1979 di Universitas Oxford Inggris menyatakan keheranannya karena cukup banyak kyai dan santri yang menolong Diponegoro. Carey menyebutkan ada 108 kyai, 31 haji, 15 Syaikh, 12 penghulu Yogyakarta dan 4 kyai guru yang ikut berperang bersama Diponegoro. Kesimpulan Carey digambarkan secara runut perkembangan Diponegoro sebagai seorang Muslim yang saleh dan pemberani. Pribadi dan kepahlawanan Diponegoro diteliti Carey hampir 30 tahun berdasarkan sumber Belanda dan Jawa. Begitu juga Kareel A Steenbrink (1984) menyebutkan pemikiran dan kiprah Pangeran

Diponegoro telah menarik para ulama, santri, dan para penghulu merapat pada barisan perjuangannya.

Begitu hebatnya motivasi agama menyebabkan Perang Diponegoro menjadi perang yang sangat menyita keuangan pemerintah kolonial. Arif Wibowo mencatat Korban perang Diponegoro: orang eropa 8.000 jiwa, orang pribumi yang di pihak Belanda 7.000 jiwa. Biaya perang 20 juta gulden. Total orang Jawa yang meninggal 200.000 jiwa. Data ini menunjukkan dahsyatnya Perang Diponegoro dan besarnya dukungan rakyat terhadapnya.

2. Pejuang yang merakyat

Diponegoro yang bernama kecil Bendoro Raden Mas Mustahar kemudian Pangeran Ontowiryo, dilahirkan di Kraton Yogyakarta pada 11 November 1785. Ayahnya Sultan II Yogyakarta sedangkan ibunya adalah Ratu Ageng, seorang keturunan kiai terkemuka, yang jika dirunut ternyata masih keturunan Sunan Ampel Denta, salah seorang Walisongo, penyebar Islam di Tanah Jawa (Carey, 2011: 85).

Pada usia 7 tahun pindah ke Tegalrejo bersama ibu dan nenek buyutnya. Diponegoro kecil diterpa oleh lingkungan pesantren yang jauh dari lingkungan kehidupan keraton. Di samping itu, kehidupan masa kecil di Tegalrejo memungkinkan Diponegoro bergaul dengan segala lapisan masyarakat. Dalam catatan Willem van Hogendorp yang dikutip Carey (2011:92), Diponegoro merupakan orang yang pandai bergaul dengan siapa saja, bahkan Diponegoro berbaur dengan rakyat jelata sama santainya dengan orang-orang berpangkat.

Hal lain yang menjadi karakter Diponegoro adalah sebagai seorang yang berjiwa wirausaha. Penghasilan pertaniannya tidak ada bandingnya di kalangan Pangeran Yogyakarta. Bahkan, penghasilannya tersebut sangat membantu pada masa permulaan Perang Jawa. Banyaknya penghasil itu juga diakui oleh Diponegoro sendiri, bahwa dia meniru teladan para kiai, pergi ke pantai selatan, ke gua Selarong bersama pengawal berkuda untuk membantu memotong dan menanam padi.

Selanjutnya, Carey (2011: 92) menilai bahwa pergaulan Diponegoro dengan orang luar keraton atau di kampung akan menambah kharisma seorang pemimpin rakyat. Tambahan pula bahwa kerabat perempuannya yang berasal

dari kalangan terkemuka di desa, yakni ibu dan neneknya, tentu saja akan menambah nilai tambah bagi seorang pemimpin perang Jawa. Bahkan, perkawinan antara wangsa keraton dan bangsawan pedesaan akan menghasilkan keturunan yang tangguh daripada bangsawan keraton.

3. Sosok yang sederhana

Leluhur Pangeran Diponegoro memberi pengaruh besar secara pribadi dan sumber ilham, terutama kerabat perempuan dalam membentuk pandangan sosial Pangeran Diponegoro. Menurut Carey (2011:84) pandangan sosial itu berakar pada keyakinan agamis yang mendalam dan hubungan yang luas dengan masyarakat santri di Jawa Tengah-selatan, hubungan yang agak tidak umum untuk seorang dirinya dari kalangan keraton. Keyakinan agamis dan hubungan sosial ini menentukan gaya kepemimpinan Diponegoro selama Perang Jawa dan terhadap karisma atau sifat kepahlawan dirinya. Carey menyimpulkan peran perempuan (Ibunda Raden Ayu Mangkorowati, neneknya Ratu Kedaton, dan nenek buyutnya Ratu Ageng Tegalrejo serta kerabat perempuan lainnya) begitu besar dalam membentuk kepribadian Diponegoro.

Sejak kecil Pangeran Diponegoro tidak dididik dengan fasilitas keraton yang serba mewah, justru dia terbiasa hidup sederhana. Dalam masa kanak-kanak sampai remaja, Diponegoro yang tinggal di Tegalrejo bersama nenek buyutnya. Berkat kesalehannya dan kesukaannya membaca kitab-kitab agama dan ketekunan merawat adat Jawa di keraton, pengabdian agama dan adat diwariskan oleh nenek buyutnya kepada Diponegoro (Carey, 2011:90). Suasana lingkungan yang jauh berbeda dengan suasana keraton Yogya telah membuat kebersahajaan desa mendekatkan Diponegoro untuk gaul akrab dengan segala lapisan masyarakat Jawa dan menjalani hidupnya dengan santai tanpa merasa diri lebih tinggi. Dalam kata-kata Willem van Hogendorp (1913:154) sebagaimana dikutip Carey, 2011:92) mengatakan:

Dalam pandangan orang Jawa, yang selalu merasa tinggi dan berjarak dalam pergaulan antara atasan dan bawahan, suatu ciri khas Diponegoro adalah bahwa sang Pangeran berbaur dengan rakyat jelata sama santainya dengan orang-orang berpangkat. Hal itu membuat Diponegoro sangat dicintai di mana-mana.

Menurut Knoerle (ajudan militer Van den Bosch yang mendampingi Diponegoro dalam pengasingannya ke Manado) mengatakan, Pangeran tampak sebagai seorang ningrat, tapi sekaligus penuh harga diri, mempunyai bakat yang tajam sehingga jarang ada duanya di kalangan ningrat Jawa. Kekuatan dan semangat kepribadiannya terpancar jelas dalam gagasan yang menggugah, kaya, kuat, dan jernih. Hal itu membuat dia sangat mengesankan bagi siapapun yang bertemu sekalipun hanya sebentar. Dalam “perundingan damai” di Magelang pada Maret 1830, panglima Belanda Letnan jenderal Merkus de Kock dan stafnya mulanya bersikap baik pada Diponegoro, tetapi akhirnya memuji sifatnya yang “terbuka dan cerdas” padahal baru beberapa hari bersama dia (Knoerle, 1835:171-171 sebagaimana dikutip Carey, 2011:126).

4. Sosok yang gemar membaca

Diponegoro punya jiwa penyelidik dan pengetahuan yang luas mengenai apapun, khususnya sejarah dan cerita-cerita Jawa. Hal ini dapat terlihat dalam buku-buku nasehatnya semasa di Makasar, mengenai wayang, dongeng-dongeng Jawa, para pahlawan khayali dan tempat-empat keramat. Dalam rangkaian percakapan Diponegoro, Knoerle mencatat bahwa pangeran tersebut berbicara panjang lebar, antara lain mengenai kerajaan-kerajaan Pajajaran dan Majapahit, Sultan pertama Demak, Raden Patah, tentara bayaran dan petualang Bali akhir abad ketujuh belas, Untung Surapati, di samping hal-hal umum pada bidang perniagaan, pelayaran, dan sejarah wangsa di Eropa. Diponegoro juga menunjukkan perhatian yang besar terhadap gambar-gambar buku yang dipinjamkan kepadanya selama pelayaran ke pengasingan, yang juga mencakup tentang agama Budha dan Perang Salib Pertama (1095-1099)(Carey, 2011: 129).

Penutup

Perjuangan Pangeran Diponegoro pada hakikatnya merupakan sumber inspirasi perjuangan Bangsa Indonesia yang selaras dengan pendidikan katarakter bangsa. Hal ini dapat dipahami mengingat perjuangan Diponegoro: mengembangkan nilai-nilai *religius, tidak mengejar tahta, kesederhanaan/kerakyatan*, dan *gemar membaca*, walaupun pasca Perang Diponegoro Pemerintah Kolonial Belanda dengan segala daya menciptakan *mitos-mitos palsu* tentang dirinya.

Daftar Pustaka

- Carey, P. 2011. *Kuasa Ramalan; Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855*. Jakarta: KPG dan KITLV.
- Kartodirdjo, S. 1988. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium*. Jakarta: Gramedia.
- Marihandono, Djoko. 2008. *Titik Balik Historiografi di Indonesia*. Jakarta: Wedatma Widya Sastra
- Nordholt, H.S., Purwanto, B., dan Saptari, R. 2008. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pane, Sanusi. 1965. *Sejarah Indonesia Jilid I dan II*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ricklefs, M.C. 2009. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.
- Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang
- Sugiharto, bang I. 1996. *Posmodernisme Tantangan Bagi Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Vlekke, B.H.M. 2008. *Nusantara Sejarah Indonesia*. Jakarta: Gramedia.